

# Fenomena *Hate Speech* (Ujaran Kebencian) di Indonesia dalam Tinjauan Filsafat Manusia

Natalius Andriyanto<sup>1\*</sup>, Daniel Deky<sup>2</sup>, Septian<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sarjana Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia; andrecs148@gmail.com

<sup>2</sup> Program Studi Sarjana Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia; dekydaniel51@gmail.com

<sup>3</sup> Program Studi Sarjana Filsafat Keilahian, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Indonesia; septianmsds@gmail.com

\* Corresponding Author

## ARTICLE INFO

### Keywords:

Communication

*hate speech*

rational

relation

the others

### Article history:

Received : 2024-05-27

Revised : 2024-12-26

Accepted : 2024-12-30

### DOI:

<https://doi.org/10.26593/jsh.v4i02.7988>

## ABSTRAK

Fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) di era modern, khususnya di media sosial, merusak harmoni pluralitas, terutama dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Berawal dari kebebasan komunikasi yang sering disalahgunakan, *hate speech* mencerminkan kurangnya etika, rendahnya kesadaran akan hidup bersama, dan penyalahgunaan kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis ujaran kebencian melalui perspektif filsafat manusia, menyoroti aspek komunikasi, kesadaran kolektif, dan kebebasan sebagai makhluk otonom. Kajian ini menegaskan pentingnya etika komunikasi dan tanggung jawab sosial dalam kebebasan berpendapat untuk mencegah ujaran kebencian. Berfilsafat manusia menawarkan solusi melalui pendidikan moral, penguatan hukum, promosi nilai-nilai etika, peran media, dan komunitas inklusif. Pendekatan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang menghormati keberagaman, memperkuat relasi sosial, dan menjaga harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## ABSTRACT

*The phenomenon of hate speech in the modern era, particularly on social media, undermines the harmony of pluralism, especially in multicultural societies like Indonesia. Emerging from the misuse of communication freedom, hate speech reflects a lack of ethics, low awareness of coexistence, and the misuse of freedom of expression. This study employs a qualitative approach using literature review methods to analyze hate speech through the lens of human philosophy, focusing on communication, collective awareness, and autonomy as rational beings. The study emphasizes the importance of ethical communication and social responsibility in exercising freedom of expression to prevent hate speech. Human philosophy offers solutions through moral education, strengthening laws, promoting ethical values, media roles, and inclusive communities. This approach aims to build a society that respects diversity, strengthens social relations, and maintains harmony in national and social life.*

## 1. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di dunia sekarang ini semakin hari semakin kompleks. Perkembangan media sosial dan pluralitas dalam kehidupan manusia terutama dalam hal sosial masyarakat memungkinkan manusia untuk bebas mengekspresikan apa saja yang menjadi bagian dari dirinya dan kesenangan dirinya. Manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya terhadap sesamanya melalui tindakan berkomunikasi. Komunikasi memungkinkan manusia sebagai subjek untuk membangun relasi dengan manusia (subjek) yang lain. Dalam arti lain, relasi antar subjek hanya akan terjadi secara intensional jika adanya kegiatan komunikasi (Donatus, 2004: 85). Komunikasi memberikan ruang bagi terjadinya sikap pengakuan akan adanya satu subjek terhadap subjek yang lain (Bakker, 2000: 39). Misalnya, jika seseorang mengatakan tentang dirinya "Saya ini mahasiswa", maka orang lain akan mengakuinya dan memperlakukannya selayaknya seorang mahasiswa. Jika seseorang mengatakan lagi tentang dirinya "Saya berasal dari Kalimantan" maka orang lain akan memahaminya bahwa ia berasal dari Kalimantan dengan segala latar belakang budaya yang ada dan menghargai keberadaannya sebagai bagian dari orang lain. Jika seseorang menceritakan latar belakang kehidupannya, maka orang lain akan mengakuinya berdasarkan apa yang ia ceritakan dan berusaha memahami dan menghargai dirinya. Beginilah yang seharusnya diwujudkan melalui pengakuan antar subjek; antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Mengakui adalah sikap rendah hati (antropologis) yang dapat dilakukan secara sederhana (Bakker, 2000; 39).

Namun, yang terjadi di dunia yang penuh kompleksitas ini adalah di mana *hate speech* (ujaran kebencian) kerap terjadi dan mengganggu keharmonisan di tengah pluralitas. Indonesia dapat dikatakan sebagai tempat subur bagi perkembangan fenomena *hate speech* baik melalui orasi umum maupun berbagai platform media sosial. Negara yang multikultural dan memiliki sekitar 13.000 pulau dan beragam budaya, suku, agama, kepercayaan, ras, dan golongan ini menjadi potensi munculnya *hate speech* yang memicu konflik di Indonesia (Nurchayono, 2018: 106). Adanya *hate speech* mengaburkan kesadaran manusia akan hidup bersama yang lain. Manusia tidak lagi mengakui keberadaan yang lain dan malah membencinya. Hal ini senada dengan ungkapan Jean Paul-Sartre, seorang filsuf eksistensial, yang mengatakan bahwa 'orang lain adalah neraka' (Riyanto, 2017: 85). Selain itu, *hate speech* juga muncul sebagai akibat dari kurangnya etika dalam berkomunikasi dan konsekuensi dari adanya kebebasan berpendapat. Media sosial adalah ladang subur bagi bertebarnya berbagai *hate speech* karena kebebasan berpendapat kini dapat diekspresikan melalui media sosial (Karo, 2023: 53). *Hate speech* kerap kali menggunakan unsur suku, budaya, agama, ras, dan golongan sebagai komponennya. Jika tidak disikapi dan ditanggapi dengan baik, maka *hate speech* akan terus berjamur di mana-mana dan akan sangat menyulitkan bagi penyelesaian permasalahan konflik sosial yang ada dalam realitas dunia ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang bertujuan untuk menganalisis fenomena *hate speech* melalui telaah mendalam terhadap berbagai referensi terkait. Penelusuran dilakukan terhadap kajian filsafat manusia, khususnya dalam aspek komunikasi manusia, kesadaran manusia akan kehadiran orang lain, dan kebebasan manusia sebagai makhluk yang otonom. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami secara filosofis bagaimana tindakan *hate speech* mencerminkan relasi interpersonal yang terganggu, serta implikasinya terhadap kebebasan berpendapat sebagai bagian dari eksistensi manusia.

Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga reflektif terhadap fenomena yang kompleks. Dengan mengintegrasikan pemahaman dari berbagai referensi, penelitian ini membangun argumen filosofis tentang pentingnya kesadaran akan kehadiran orang lain dalam menjaga etika komunikasi. Selain itu, kebebasan manusia untuk berpendapat ditinjau dari perspektif filsafat otonomi, sehingga dapat dievaluasi batasan-batasan etis yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut menjadi alat perpecahan sosial melalui *hate speech*. Metodologi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diangkat dengan dasar filosofis yang kokoh.

### 3. HASIL DAN DISKUSI

#### Manusia sebagai makhluk yang berbahasa dan berkomunikasi

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki bahasa (logos) dan akal budi. Pandangan ini melahirkan suatu pengertian akan manusia sebagai '*homo est anima rationale*' (Donatus, 2004; 32). Sejak zaman dahulu kala, manusia sudah mulai mengenal huruf/kaligrafi sebagai sarana berbahasa manusia, misalnya huruf Latin, huruf Yunani, kaligrafi China, kaligrafi Mesir Kuno, dan lain sebagainya. Huruf-huruf tersebut diciptakan sebagai interpretasi bahasa manusia yang tertuang melalui tulisan-tulisan surat dan komunikasi lisan melalui pembacaan. Setiap huruf memiliki bunyi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing (Gombrich, 2020; 36). Huruf/kaligrafi tersebut adalah tanda dalam berbahasa verbal dan saling tersusun satu sama lain membentuk bunyinya. Maka, bahasa dan tanda bahasa tersusun satu sama lain. Singkat kata, bahasa dapat dikatakan sebagai suatu gudang persediaan yang memungkinkan terbentuknya tanda-tanda bahasa yang juga sekaligus menandakan peristiwa terjadinya bahasa manusia (Donatus, 2004; 34).

Setidaknya ada tiga fungsi yang dimunculkan dalam bahasa, yaitu:

1) Fungsi presentasi. Bahasa berfungsi menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah benda, hal, atau keadaan yang memiliki cara berada yang berbeda-beda. Bahasa menghadirkan cara berada suatu benda dengan keadaannya. Dalam konteks budaya Indonesia, bahasa mempresentasikan identitas suku dan budaya tertentu, seperti bahasa Dayak mempresentasikan identitas suku dan budaya Dayak, bahasa Jawa mempresentasikan identitas suku dan budaya Jawa, bahasa Batak mempresentasikan identitas suku dan budaya Batak, dan lain sebagainya.

2) Fungsi komunikasi. Bahasa berfungsi untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada yang lain baik secara verbal (ucapan atau kata-kata) maupun secara non verbal (isyarat atau tanda). Komunikasi yang terjalin tidak hanya terbatas pada komunikasi antar individu, melainkan sudah meranah dalam kelompok-kelompok sosial.

3) Fungsi pengungkapan diri. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan diri. Contoh saja, ketika seseorang merasa lapar, ia akan mengatakan 'saya lapar' sambil memulus perutnya. Kalimat 'saya lapar' adalah bentuk pengungkapan pada dirinya bahwa ia sedang merasa lapar. Namun ada yang lebih luas lagi dari kata-kata, seperti dalam mengungkapkan rasa sakit. Seseorang dapat berteriak 'aauu' atau 'aduuhh, sakit' sembari menjerit. Kata-kata yang diucapkan itu tidak mengandung susunan gramatis, tetapi dapat menjadi penegasan bahwa seseorang itu sedang dalam keadaan kesakitan. Situasi kesakitan itu kemudian kerap diperindah dengan kata-kata yang puitis seperti pada nyanyian ratapan atau kidung kesedihan. Dalam budaya modern, bahasa sebagai alat pengungkapan diri sudah berkembang lebih pesat, seperti munculnya tarian, nyanyian rakyat, puisi, drama theater, pantun, dan sebagainya. Semua itu adalah hasil dari kreativitas dan keterampilan akal budi manusia dalam mengungkapkan dirinya dalam perkembangan zaman yang begitu pesat ini (Donatus, 2004; 35-38).

Selain manusia adalah makhluk yang berbahasa dan berakal budi, manusia juga adalah makhluk yang berkomunikasi (komunikatif). Manusia berkomunikasi karena berkolerasi dengan yang lain. Melalui komunikasi, manusia dapat menjalin relasi dengan yang lain. Tanpa adanya komunikasi, relasi antara satu manusia dengan manusia yang lain sangat sulit terjadi (Bakker, 2000; 141). Komunikasi mengandaikan bahwa manusia memiliki pikiran yang dianut secara bersama (sesuai dengan akar kata bahasa Latin '*communa-ae*' yang berarti 'kebersamaan', '*communicare*' yang berarti 'membuat sama', dan kemudian berkembang menjadi '*communicatus*' yang berarti 'berbagi' atau 'menjadi milik bersama') (Ridwan, 2013; 91-92). Bahasa mutlak dibutuhkan dalam berkomunikasi. Sebab, tanpa adanya bahasa, komunikasi tidak akan berjalan sehingga manusia tidak tahu apa yang menjadi pengungkapan dirinya dalam realita dunia. Tanpa bahasa, manusia bahkan tidak dapat mengetahui baik dirinya maupu realitas yang ada dalam dirinya sehingga mustahil juga untuk mengetahui realitas yang dan di luar dirinya. Maka, bahasa berperan sebagai jembatan antara realitas diri manusia dengan realitas di luar dirinya. Jembatan itu dapat dilalui melalui kegiatan komunikasi (Donatus, 2004; 38-39).

Namun, yang menjadi persoalan adalah; apakah manusia sungguh-sungguh berkomunikasi (dalam arti lain; apakah bahasa berfungsi secara tepat dan benar sehingga komunikasi dapat berjalan secara baik?). Kegiatan komunikasi kerap dianggap remeh oleh kebanyakan orang karena beranggapan bahwa semua orang dapat berkomunikasi (sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk komunikatif). Pendapat tentang semua orang dapat berkomunikasi adalah benar, tetapi tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan baik. Ada suatu saat di mana terjadi suatu miskomunikasi (komunikasi yang salah) yaitu di mana pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan disalahartikan oleh penerima pesan, atau lebih parahnya, pengirim pesan memanipulasi realitas yang ia lihat dan mengirim pesan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga penerima pesan seolah-olah akan mengonsepsikan pesan dalam arti yang salah pula (atau bahkan memercayai yang salah; fakta yang ada di realitas tidak sesuai dengan pesan yang tersampaikan) (Ridwan, 2013; 91). Hal ini dapat melahirkan fenomena-fenomena buruk seperti '*hoax*' yang berkembang menjadi '*hate speech*' dan sebagainya. Fenomena ini kemudian memperburuk fungsi bahasa yang di mana bahasa dalam hal ini sudah tidak berfungsi menjadi pengantara kebenaran (Donatus, 2004; 38).

Bahasa ada bukan sekadar sebagai temuan belaka, tetapi lebih-lebih karena kebutuhan manusia sebagai individu dalam hidup berkomunitas. Suatu bangsa secara keseluruhan merupakan komunitas bahasa yang kreatif, organis, dan natural. Maka, peran bahasa dalam komunitas universal sangatlah penting. Sebab, tanpa bahasa, komunitas universal tidak akan terbentuk dan kebudayaan masyarakat mustahil untuk lahir (Bagus, 2005; 115). Tetapi, tanpa komunikasi, bahasa tidak memiliki jalur untuk sampai pada manusia dalam mengenal diri dan realitas. Kehidupan manusia pun akan terasa hampa dan sepi jika tanpa kegiatan berkomunikasi (Ridwan, 2013; 94). Karena bahasa dan komunikasi sama-sama sangat penting dalam kehidupan manusia, maka ada kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing individu yaitu bagaimana manusia dapat menggunakan bahasa dengan baik, benar, dan tepat (tanpa menyimpang dari fungsi bahasa yang seharusnya) sehingga komunikasi antara satu manusia dengan yang lain pun dapat berjalan dengan baik dan mengarah pada nilai-nilai kebenaran.

Agar dapat menggunakan bahasa dengan baik, benar, dan tepat, serta dapat berkomunikasi dengan baik, maka manusia membutuhkan etika dalam berbahasa dan berkomunikasi. Etika secara sederhana dimengerti sebagai aturan praktis (Yun: '*ethikos*' yang berarti 'adat, kebiasaan, dan praktik') (Bagus, 2005; 217). Istilah etika digunakan oleh Aristoteles dalam menyebut istilah 'Jalan Tengah' yaitu ajaran mengenai keutamaan moral yang harus dimiliki manusia dalam mencapai hidup kebahagiaan. Keutamaan berperan dalam membantu manusia dalam memutuskan mana yang baik dan mana yang jahat sehingga arahnya tertuju pada dua hal; kebenaran yang membawa kebahagiaan (kebaikan tertinggi manusia) atau kesesatan yang membawa penderitaan dan kesengsaraan (Garvey, 2010; 24-28). Dalam berbahasa dan berkomunikasi, etika dapat membantu mengembangkan suatu aturan dan kaidah mengenai berbahasa yang baik, benar, dan tepat pada fungsinya, sehingga manusia dapat menjalankan kegiatan komunikasi dengan cara yang etis dan baik pula

### **Manusia memiliki kesadaran akan yang lain**

Manusia adalah makhluk yang memiliki kesadaran. Kesadaran dapat mengacu pada dua hal, yaitu; perhatian yang diberikan terhadap isi penyerapan atau objek yang dialami, atau; perhatian yang diberikan terhadap kegiatan memperhatikan itu sendiri. Kesadaran dapat berarti dua hal, yaitu kesadaran dalam alam pikiran manusia (*consciousness*) dan kesadaran manusia dalam dirinya (*self-awareness*) (Bagus, 2005; 965). Kesadaran merupakan bagian dari elemen rohaniah manusia sebagai bagian dari terjadinya keberadaan manusia (Donatus, 2004; 71).

Salah satu dimensi kesadaran manusia adalah kesadaran diri manusia dan kesadaran dari diri yang lain. Kesadaran ini terjadi ketika manusia memandang relasi dari dirinya dengan subjek yang ada di luar dirinya. Kesadaran ini hanya akan terwujud dalam satu relasi dan komunikasi antar kesadaran. Komunikasi dan relasi ini dimungkinkan oleh intensionalitas kesadaran itu sendiri. Kesadaran sendiri bersifat terbuka dan terarah. Dengan disposisinya yang demikian, kegiatan kesadaran ini dapat mentransendkir diri manusia untuk keluar dari dirinya dan membangun

komunikasi dengan yang lain di luar dirinya (Donatus, 2004; 85). Kesadaran ini mempertegas pemikiran filosofis-humanis Martin Heidegger yang mengungkapkan bahwa manusia adalah *"being with the others"* (ada bersama yang lain) (Segev, 2013; 8-9).

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari yang lain. Yang lain adalah bagian dari dunia kehidupan manusia adalah suatu hal yang tidak dapat disangkal. Manusia menyadari akan diri bersama dengan yang lain dengan kenyataan pluralitas yang memiliki pusat otonom yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain (Bakker, 2000; 35). Usaha untuk mengenal diri hanya akan terjadi apabila manusia berjumpa dengan yang lain. Manusia dalam subjek 'aku' perlu yang lain agar dapat mengenal diri'ku' (Donatus, 2004; 50). Tidak ada 'aku' yang murni. Semua kesadaran 'aku' adalah kesadaran bersama dengan yang lain. 'Aku' dapat memiliki identitas dan karakteristik yang demikian karena adanya pengakuan dari yang lain terhadap 'aku'. Contoh sederhana, jika 'aku' sebagai mahasiswa tidak mengakui dosen atau dosen tidak mengakui 'aku' sebagai mahasiswa, maka 'aku' tidak sadar bahwa 'aku' adalah mahasiswa dan 'aku' juga tidak pantas menyebut diri sebagai seorang mahasiswa. Singkat kata, tanpa adanya pengakuan antara 'aku' dengan yang lain, maka identitas diri 'aku' mengabur dan kehilangan batasan yang jelas dan dapat ditangkap oleh indra manusia (Bakker, 2000; 38-39).

Yang lain juga membutuhkan 'aku' untuk mengenali dirinya. Yang lain adalah bagian dari dunia'ku'. Sebagaimana 'aku' menerima pengakuan dari yang lain, maka yang lain juga menerima pengakuan dari 'aku'. 'Aku' memiliki arti bagi yang lain, demikian juga yang lain memiliki arti bagi 'aku' (Bakker, 2000; 40). Sederhananya, 'aku' dan yang lain sama-sama saling mengakui keberadaannya. 'Aku' tidak akan memiliki arti, makna, dan identitasnya tanpa adanya pengakuan dari yang lain, begitu juga yang lain tidak akan memiliki arti, makna, dan identitasnya tanpa pengakuan dari 'aku'. Pengakuan antara 'aku' dengan yang lain adalah hubungan timbal balik yang memungkinkan terjadinya relasi dalam hidup bersama (berkomunitas).

'Aku' dan yang lain sebenarnya sama-sama berdiri di atas basis yang sama, yaitu 'Self' (Diri). 'Aku' adalah Diri'ku' sendiri, begitu juga yang lain adalah Dirinya sendiri. Hubungan antara 'aku' dan yang lain hanya memperkokoh jati diri masing-masing, yaitu bahwa yang lain menjadi sepenuhnya yang lain ketika berhadapan dengan 'aku'. Begitu juga 'aku' menjadi yang lain baginya ketika 'aku' berhadapan dengan yang lain (Donatus, 2004; 51). Namun, suatu fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa 'aku' hidup bersama dengan yang lain. Kehidupan 'aku' tidak dapat dilepaskan dari yang lain. Contoh yang paling konkret adalah kenyataan bahwa 'aku' dilahirkan oleh yang lain yaitu ibu'ku'. 'Aku' dibesarkan oleh yang lain yaitu ayah-ibu'ku'. 'Aku' dididik oleh yang lain yaitu guru'ku'. 'Aku' menjadi ada dan memiliki arti dan kekhasan bagi yang lain karena ada pengakuan dari yang lain terhadap 'aku' yaitu teman-teman'ku', sahabat'ku', orang-orang di sekitar'ku', dan sebagainya. Contoh konkret ini menegaskan bahwa 'aku' dan yang lain saling meng'ada'kan. 'Aku' ada karena yang lain, begitu juga yang lain ada karena 'aku' (Bakker, 2000; 39-43).

Misalkan saja dalam konteks budaya Indonesia, 'aku' hidup bersama dengan yang lain entah yang lain itu berasal dari suku, budaya, atau pulau yang sama dengan 'aku' atau berbeda dengan 'aku'. Contoh konkret, 'aku' yang adalah orang Dayak dan beragama Katolik hidup dengan yang lain entah itu sama-sama Dayak dengan 'aku' atau berbeda dengan 'aku'; entah itu sama-sama beragama Katolik atau berbeda dengan 'aku'. Namun, yang ditekankan adalah nilai pengakuan. 'Aku' tidak dapat menyebut diri'ku' orang Dayak jika tanpa adanya yang lain yang mengakui 'aku' sebagai orang Dayak, atau 'aku' tidak dapat menyebut diri sebagai seorang yang beragama Katolik jika tanpa adanya yang lain yang mengakui 'aku' sebagai seorang Katolik. Begitu juga yang lain tidak dapat menyebut dirinya dalam identitasnya jika tidak ada 'aku' yang mengakui yang lain dalam identitasnya. Misalkan saja, yang lain itu tidak dapat menyebut dirinya sebagai orang Jawa jika tanpa adanya subjek 'aku' yang mengakuinya sebagai orang Jawa, atau ia tidak dapat menyebut diri sebagai seorang yang beragama Islam jika tanpa adanya subjek 'aku' yang mengakuinya sebagai seorang Muslim. Tanpa adanya sikap kesadaran relasi dan saling mengakui satu sama lain, maka identitas 'aku' dan yang lain sama-sama tidak akan memberi arti dalam realitas manusia. 'Aku' dengan identitasku dan yang lain dengan identitasnya sama-sama hidup dalam satu komunitas universal yaitu negara Indonesia, negara multikultural. 'Aku' dan yang lain sama-sama hidup dalam

tatanan dan perlindungan hukum yang sama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Afandi & Munif, 2015; 2-3, Bakker, 2000; 45, & Donatus, 2004; 81)

Dengan pemahaman-pemahaman yang sedemikian rupa, maka sangatlah penting kehadiran yang lain dalam diri manusia. Kehidupan sosial manusia tidak mungkin akan terjadi jika tidak adanya relasi antara 'aku' dengan yang lain. Melalui ini, maka dibutuhkan adanya kesadaran manusia sebagai subjek 'aku' dengan yang lain sebagai bagian dari dimensi kesadaran manusia. Manusia menyadari bahwa yang lain adalah bagian dari dirinya, begitu juga dirinya adalah bagian dari yang lain. 'Aku' dan yang lain hidup bersama sebagai suatu komunitas universal. 'Aku' hidup bersama yang lain, begitu juga yang lain hidup bersama dengan 'aku'.

### **Manusia sebagai makhluk yang bebas dan otonom terutama dalam mengemukakan pendapat**

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak dasar yang melekat pada setiap individu. Secara umum istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk melakukan sesuatu (Sartini, 2008: 242). Dalam konteks manusia sebagai makhluk yang bebas dan otonom, kebebasan ini tidak hanya menjadi cerminan dari nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi juga merupakan hakikat dari eksistensi manusia itu sendiri. Melalui kebebasan mengemukakan pendapat, manusia mampu menilai, mengekspresikan, dan memperjuangkan ide-ide serta keyakinan yang diyakini sebagai kebenaran. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi (Harahap, 2003: 73).

Kebebasan berpendapat merupakan kemampuan prinsipiil dalam diri manusia untuk mengambil keputusan sendiri atau menentukan sikap tertentu, dan kemampuan ini keluar dari kesadaran bebas atau persetujuan bebas yang mengarah semata-mata kepada kebaikan (Donatus, 2004: 91). Otonomi tersebut tidak hanya sebatas kebebasan fisik, tetapi juga mencakup kebebasan pikiran dan ekspresi. Kebebasan berpikir dan berekspresi menjadi hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik (Gettari, dkk, 2023: 230). Otonomi individu adalah salah satu pilar penting dalam filsafat liberalisme, yang menekankan pentingnya kebebasan dan hak-hak individu dalam menghadapi otoritas dan kontrol eksternal. Filsuf seperti Immanuel Kant dan John Stuart Mill menekankan bahwa penghormatan terhadap otonomi individu merupakan dasar dari moralitas dan keadilan dalam masyarakat (Aliano & Riyanto, 2022: 168).

Mengemukakan pendapat merupakan salah satu bentuk ekspresi dari otonomi individu. Ketika seseorang menyuarakan pendapatnya, ia tidak hanya menyampaikan ide atau gagasan, tetapi juga menegaskan identitas dan kepercayaannya (Dewi, 2021: 32). Dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak asasi yang melekat pada setiap manusia, seperti yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Rahmawati, dkk, 2021: 62). Kebebasan ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan politik. Dengan demikian, kebebasan berpendapat bukan hanya hak individu, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya.

Namun, kebebasan berpendapat juga menimbulkan tantangan dan resiko, salah satunya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial (Herawati, 2016: 140-141). Kebebasan berpendapat harus disertai dengan kesadaran seseorang terhadap dampak dari kata-kata dan tindakannya terhadap orang lain. Oleh karena itu, dalam banyak negara, kebebasan berpendapat dibatasi oleh hukum yang melarang ujaran kebencian, fitnah, dan hasutan untuk kekerasan. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan martabat orang lain, serta menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pandangan masyarakat terhadap kebebasan berpendapat. Media sosial memberikan platform yang lebih luas bagi individu untuk menyuarakan pendapatnya dan mengakses informasi. Namun, media sosial juga dapat

menjadi ruang yang penuh dengan hoax, ujaran kebencian, dan isu-isu yang memecah-belah (Herawati, 2016: 141). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana kebebasan berpendapat dapat dikelola di era digital, serta peran pemerintah dan perusahaan teknologi terhadap penggunaan media online tanpa menghalangi kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat juga sama dengan kebebasan berpikir. Kemampuan untuk berpikir secara bebas dan kritis merupakan pendorong bagi kemajuan manusia, yang akan memancing individu untuk menemukan ide-ide baru, menantang situasi terkini, dan mencari solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi (Bakker, 2000: 247). Dalam sejarah, banyak kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang lahir dari keberanian individu untuk berpikir dan berbicara secara bebas (Kusuma, 2023: 100). Oleh karena itu, kebebasan berpikir dan berpendapat harus dipertahankan dan dilindungi sebagai potensi berharga yang mendorong perkembangan manusia dan masyarakat.

### ***Hate speech* sebagai akibat dari kurangnya etika dalam berkomunikasi, kurangnya kesadaran akan hidup bersama yang lain, dan kekeliruan dalam penggunaan kebebasan berpendapat**

Adanya perkembangan media komunikasi dan kebebasan manusia dalam berpendapat ternyata membawa konsekuensi negatif yaitu terjadinya *hate speech* yang kian mengancam keharmonisan kehidupan manusia dalam relitas di masa sekarang ini. Tidak dapat disangkal lagi bahwa Indonesia sebagai negara yang multikultural adalah tempat yang sangat merasakan ancaman akan bahayanya fenomena *hate speech*. *Hate speech* yang tidak terkendali berpotensi memicu terjadinya konflik di berbagai daerah dan mengancam kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam tulisan ini, ada tiga hal yang menjadi sorotan penulis dalam fenomena *hate speech* dalam telaah filsafat manusia.

Pertama, *hate speech* terjadi karena manusia kurang beretika dalam berkomunikasi. Manusia bukan saja makhluk yang berbahasa dan berkomunikasi, tetapi juga memiliki akal budi. Akal budi berguna sebagai pengarah dan penuntun bagi manusia untuk hidup menuju kebahagiaan melalui tatanan hidup praktis yang mengarah pada kebaikan dan kebenaran. Karena manusia memiliki akal budi, maka manusia juga dituntut untuk memiliki etika dalam segala aspek kehidupan terutama dalam berbahasa dan berkomunikasi (Bagus, 2005; 218 dan Garvey, 2010; 26-27). Maka, etika sudah menjadi bagian dari kodrat manusia sebagai anima rationale (makhluk yang berakal budi; makhluk yang lebih unggul dan berbeda dari makhluk-makhluk lain). Berbahasa dan berkomunikasi yang etis mengandaikan bahwa manusia dapat memilih dan memilah setiap kata yang hendak diungkapkan dan diucapkannya, mana yang pantas dan mana yang tidak. Kata-kata yang pantas adalah kata-kata yang mempresentasikan kebaikan, sedangkan kata-kata yang tidak pantas adalah kata-kata yang mempresentasikan kejahatan. Meskipun manusia adalah makhluk yang bebas dan otonom, tetapi manusia cerdas sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dan akal budi dapat lebih selektif dan berhati-hati terhadap perkataan yang diungkapkan dan diucapkannya. Namun, yang terjadi saat ini adalah bahwa manusia kurang mengikuti arahan akal budi dalam berbahasa dan berkata-kata sehingga berpotensi menghasilkan kata-kata kebencian yang kemudian memprovokasi dan menghasut manusia lain untuk membenci juga. Fenomena ini juga memunculkan suatu kelompok para 'pewartanya kebencian' yang disebut sebagai haters (Mawarti, 2018; 91). Haters cenderung beraksi dengan landasan kebebasan pribadi (dalam hal ini, kebebasan menurut kemauan dan kehendak sendiri; bertindak sesuka hati (semau gue)). Haters dapat saja sesuka hati mengucapkan kata-kata kebencian (bahkan yang lebih buruknya sampai membawa embel-embel suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)) untuk menunjukkan eksistensi dan kehebatan pribadinya seperti dalam hal menghakimi, menuding, membully, dan lain sebagainya tanpa merasa terikat dan terhalang oleh apapun, termasuk akal budi dan hukum moral sekalipun (Donatus, 2004; 89 & Mawarti, 2018; 92). Kenyataan miris semakin terlihat bahwa kebebasan yang 'liar' dikedepankan sedangkan akal budi dan etika yang sejatinya menjadi bagian dari kodrat manusia dikesampingkan (bahkan tidak dihiraukan sama sekali) dalam fenomena *hate speech* ini.

Kedua, *hate speech* terjadi karena manusia kurang memiliki kesadaran akan hidup bersama dengan yang lain. Sesuai dengan artinya, *hate speech* adalah suatu tindakan komunikasi yang

dilakukan oleh manusia atau sekelompok manusia dengan tujuan untuk menghasut, memprovokasi, atau menghina manusia atau sekelompok manusia yang lain, entah itu dalam hal latar belakang, suku, agama, ras, golongan, etnis, atau lain sebagainya (Mawarti, 2018; 85). Jelas, sikap yang dimunculkan dalam *hate speech* adalah sikap benci (*hate attitude*) antara manusia sebagai subjek 'aku' terhadap yang lain. Benci berlawanan dengan 'cinta' yang seharusnya disadari sebagai bagian dari akal budi manusia untuk mencapai kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Cinta tidak dipandang dalam arti sempit (sebatas hubungan nafsu atau seksual) tetapi lebih mengarah pada cinta Platonis (cinta persahabatan yang lebih luas dari hubungan naluriah/seksual) (Bagus, 2005; 141-142). Pengakuan dan kesadaran relasi antara manusia sebagai subjek 'aku' dengan yang lain hanya akan terjadi jika manusia memiliki kesadaran akan cinta persahabatan yang ada dalam dirinya. *Hate speech* tidak memberikan ruang bagi adanya pengakuan antara 'aku' dengan yang lain. *Hate speech* lebih mengarah kuat pada individualisme, baik itu individualisme personal maupun komunal (misalnya ketika terdengar suatu ungkapan yang berbunyi: 'aku' lebih baik atau lebih unggul daripada yang lain; kelompok'ku' lebih baik atau lebih unggul dari pada kelompok yang lain; yang lain lebih buruk dari 'aku'; kelompok yang lain lebih buruk dari kelompok'ku; dan sebagainya) (Bakker, 2000; 37). Suatu ucapan (*speech*) dapat dikatakan sebagai *hate* apabila mengandung setidaknya dua hal: pertama, seseorang mengutarakan rasa benci atau intoleransi ekstrim terhadap yang lain, dan; kedua, ungkapan rasa benci tersebut ditujukan kepada yang lain berdasarkan identitasnya seperti ras atau orientasi seksualnya (Mawarti, 2018; 86). Fenomena *hate speech* di Indonesia sudah kerap terjadi baik melalui ucapan lisan maupun melalui unggahan atau konten-konten di berbagai platform media sosial. *Hate speech* di Indonesia kerap terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, budaya, atau golongan tertentu (Gabur, 2023; 4). Dapat dibayangkan saja bahwa manusia akan saling membenci hanya dengan sekali klik di media sosial. Melalui *hate speech*, manusia yang seharusnya menjadi *being for the others* (filsafat Heidegger yang berarti; ada bersama yang lain) justru berubah menjadi *being against the others* (ada melawan yang lain) (Segev, 2013; 17).

Ketiga, *hate speech* terjadi karena manusia keliru dalam menggunakan kebebasannya terutama dalam hal mengemukakan pendapat. Meskipun pada kodratnya manusia adalah makhluk yang otonom, tetapi yang perlu ditegaskan bahwa kebebasan yang sejati adalah kebebasan untuk hidup rasional sesuai kodratnya sebagai manusia (berbuat kebaikan dan mengejar kebahagiaan tanpa halangan apapun (penekanan pada kebebasan Stoicisme)) (Bagus, 2005; 410-411). Kebebasan berpendapat dijamin oleh hukum dan undang-undang karena manusia juga adalah makhluk yang berpendapat, tetapi bukan berarti kebebasan ini melegalkan adanya *hate speech*. *Hate speech* justru merupakan perbuatan yang dilarang hukum karena berpotensi merusak dan mengancam ketahanan bangsa dan negara. Tentunya, kebebasan berpendapat berbeda dengan *hate speech* (Karo, 2023; 58-59). Sayangnya, banyak haters kerap kali keliru dalam menggunakan kebebasan berpendapat itu. Mereka kerap mengonsepsikan kebebasan terbatas pada pemahaman 'mengikuti kehendak sendiri' sehingga mereka dapat saja 'sesuka hati' dalam berkata-kata baik dalam ucapan lisan maupun di media sosial termasuk dalam membuat dan menyebarkan *hate speech*. Karena mereka sudah merasa bebas dengan persepsi yang demikian, maka mereka tidak memerlukan etika ataupun kaidah akal budi dalam melakukan aksi *hate speech*. Kebebasan yang ada pada *hate speech* adalah kebebasan yang 'terlalu kelewatan' dan jika tidak dikendalikan maka akan berakibat pada kerugian bagi kehidupan sosial manusia. Kebebasan kehendak yang seharusnya semata-mata mengarah pada kebaikan justru terbelok pada arah kejahatan (Donatus, 2004; 89-91 & Karo, 2023; 58).

### **Berfilsafat manusia sebagai cara menyikapi dan menangkal fenomena *hate speech* di Indonesia 3.5**

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan masalah serius di Indonesia yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti diskriminasi, kekerasan, dan perpecahan bangsa. Untuk itu, penting untuk mencari solusi untuk mencegah dan memeranginya. Dalam filsafat manusia, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mencegah ujaran kebencian:

**a. Pendidikan dan kesadaran.** Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia memaui upaya pengajaran

dan pelatihan. Tujuannya meningkatkan edukasi dan kesadaran manusia/masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian melalui program sekolah, kampanye media, dan pelatihan komunitas. Dengan adanya pendidikan, manusia semakin akan semakin terdidik dan terpelajar dengan hal-hal moral yang positif. Dan manusia akan sadar dan peka mana yang baik bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ketika sudah tergolong dalam kehidupan masyarakat, manusia akan cenderung untuk semakin terbuka membuka diri untuk menjalin komunikasi yang baik dengan sesama masyarakat setempat. Hal ini telah di dukung karena sudah mendapat pendidikan yang baik dan bisa menerapkan ilmu-ilmu sesuai bidang yang mereka miliki demi kebaikan hidup bermasyarakat.

Kesadaran adalah kesadaran tentang keseluruhan eksistensi dan keberadaan manusia itu merujuk pada dirinya sendiri (Armada, 2017; 60). Hal ini, mendorong dialog dan toleransi antar kelompok yang berbeda melalui program edukasi dan kegiatan sosial. Kesadaran itu akan membawa kita kepada suatu yang bernilai dan berguna, contohnya mencari dan mengali informasi dari orang lain. Dengan demikian manusia dapat menyimpan pengetahuannya itu demi kebaikan dirinya terutama yang bernilai positif sebab manusia akan dipenuhi dengan pengetahuan yang tak terbatas.

**b. Penguatan hukum dan regulasi.** Memperkuat hukum dan regulasi yang melarang ujaran kebencian di platform online dan offline. Memastikan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku ujaran kebencian. Hukum dan regulasi harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat harus diedukasi tentang pentingnya hukum dan regulasi, serta bagaimana cara mematuhi. Dan budaya hukum harus ditumbuhkan dalam masyarakat agar hukum menjadi norma yang dipegang teguh. Kebudayaan ini baru meliputi perwujudan (badan) manusia: cara makan, tidur, menari, berbicara, berkerja, bermain, bercinta dan berpikir (Bakker, 2000; 122).

**c. Etika dan moral.** Mempromosikan nilai-nilai etika dan moral seperti empati, respek, dan toleransi dalam masyarakat. Dengan adanya promosi tersebut dapat membuka wawasan atau pandangan positif untuk bertindak dengan bijak dan berwibawa. Dengan demikian nilai tersebut memiliki makna sebagai pandangan maupun orientasi etis yang memerlukan adanya pengambilan sikap yang wajar dalam situasi atau kondisi masyarakat plural dan mendorong tanggung jawab individu untuk menghindari ujaran kebencian dan menggunakan media sosial dengan bijak.

**d. Peran media.** Membangun kerjasama antara media massa, platform online, dan organisasi masyarakat sipil untuk memerangi ujaran kebencian. Dan mendorong media massa untuk mempromosikan konten yang positif dan konstruktif. Konten positif dapat membantu menyebarkan nilai-nilai positif seperti kebaikan, toleransi, dan saling menghormati. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih kondusif dan ramah bagi semua orang. Dan membagikan konten positif tentang diri sendiri dan orang lain dapat membantu membangun citra diri yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri.

**e. Penguatan ketahanan komunitas.** Membangun komunitas yang kuat dan inklusif yang dapat melawan ujaran kebencian dan melindungi kelompok minoritas. Komunitas menyediakan ruang bagi orang-orang untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki kesamaan dengan mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan isolasi, serta membangun rasa kebersamaan dan saling memiliki terutama bagi yang minoritas. Dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memerangi ujaran kebencian. Sebab Komunitas yang kuat dapat membantu memperkuat masyarakat dengan mempromosikan nilai-nilai positif, mendorong partisipasi sipil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Fenomena *hate speech* (ujaran kebencian) di Indonesia merupakan refleksi dari kompleksitas hubungan manusia dalam konteks kemajuan teknologi komunikasi dan keragaman budaya yang tinggi. Dalam kehidupan sosial yang semakin plural, media sosial memberikan ruang yang luas bagi individu untuk mengekspresikan diri. Namun, kebebasan ini sering kali disalahgunakan, yang mengakibatkan meningkatnya insiden *hate speech*. Fenomena ini tidak hanya merusak keharmonisan sosial tetapi juga mengaburkan kesadaran akan pentingnya hidup

bersama dan saling menghormati dalam keberagaman.

Manusia adalah makhluk yang berkomunikasi dan memiliki kesadaran akan keberadaan yang lain. Komunikasi antar manusia harusnya mencerminkan pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan orang lain. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, komunikasi yang baik seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat ikatan sosial dan saling pengertian antar suku, agama, dan budaya. Namun, realitas menunjukkan bahwa *hate speech* sering kali mengabaikan prinsip-prinsip ini, berakar pada kurangnya etika dalam berkomunikasi dan kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab.

Manusia merupakan makhluk yang bebas dan otonom, memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Namun, kebebasan ini membawa konsekuensi yang membutuhkan kesadaran etis dan tanggung jawab sosial. Ketika kebebasan berpendapat diekspresikan tanpa memperhatikan etika komunikasi, maka hal itu dapat dengan mudah berubah menjadi *hate speech*. Ini menunjukkan bahwa etika dalam berkomunikasi adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang dapat merugikan orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Kajian filsafat manusia menawarkan cara untuk memahami dan menyikapi fenomena *hate speech*. Filsafat manusia menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan yang lain, serta menekankan etika dalam berkomunikasi. Dengan demikian, berfilsafat manusia memberikan landasan yang kuat untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghormati keberagaman dan menghindari ujaran kebencian.

Di Indonesia, keberadaan *hate speech* seringkali berhubungan dengan isu-isu sensitif seperti suku, agama, ras, dan golongan. Ini mencerminkan ketegangan yang ada dalam masyarakat multikultural. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh dalam menangani *hate speech*, yang mencakup pendidikan etika komunikasi, peningkatan kesadaran akan pluralitas, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *hate speech*. Untuk menangkal fenomena *hate speech*, perlu ditanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya etika dalam berkomunikasi dan penghargaan terhadap keberagaman. Pendekatan ini harus dimulai dari pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Media sosial sebagai platform yang paling sering digunakan untuk *hate speech* juga perlu diatur dengan kebijakan yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan etika.

## REFERENCES

- Aliano, Y. A. dan Riyanto, A. (2022). "Pemulihan Martabat Manusia dalam Perspektif Metafisika Persahabatan". *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2): 162-172.
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Bakker, A. (2000). *Antropologi Metafisik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dewi, C. I. D. L. (2021). "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi". *Jurnal Yustitia*, 15(1): 26-34.
- Donatus, S. K. (2004). *Filsafat Manusia (Diktat)*. Malang: STFT Widya Sasana.
- Gabur, D. A. (2023). "Etika Komunikasi di Era Digital dalam Fenomena Hate Speech Netizen Indonesia". *Jurnal Poros Politik*, 1-9.
- Garvey, J. (2010). *20 Karya Filsafat Terbesar* (terj. C. B. Mulyatno). Yogyakarta: Kanisius.
- Gettari, T. R. dkk, (Januari 2023). "Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia*, 5(2): 228-232.
- Gombrich, E. H. (2010). *Sejarah Dunia Untuk Pembaca Muda* (terj. E. Soeprapto-Hastrich). Tangerang: Marjin Kiri.
- Harahap, K. (2003). *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti Kuntjoro.
- Herawati, Dewi M. (2016). "Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat". *Jurnal Promedia*, 2(2): 138-155.
- Karo, R. P. P., (2023). "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-nilai Keadilan Bermartabat". *Jurnal Lemhamnas RI*, 10(4): 52-65.

- Kusuma, E. (2023). "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Sanskara Hukum dan HAM*, 1(3): 97-101.
- Mawarti, S., (2018). "Fenomena Hate Speech: Dampak Ujaran Kebencian". *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 10(1): 83-95.
- Nasution, L. (2020). "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital". *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(3): 37-48.
- Nurchayono, H., (2018). "Pendidikan Multikultural di Indonesia: Analisis Sinkronis dan Diakronis". *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi*, 2(1): 105-115.
- Rahmawati, N. dkk, (2021). "Kebebasan Berpendapat terhadap Pemerintah melalui Media Sosial dalam Perspektif UU ITE". *Jurnal Pranata Hukum*, 3(1): 62-76.
- Ridwan, H. A. (2013). *Filsafat Komunikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Riyanto, A. (2017). "Aku Indonesia, Aku Pancasila: Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri". *Seri Filsafat & Teologi*, 27(26): 59-70.
- \_\_\_\_\_. (2017). "Asal Usul "Liyan"". *Seri Filsafat & Teologi*, 27(26): 71-89.
- Sartini. (2008). "Etika Kebebasan Beragama". *Jurnal Filsafat*, 18(3): 241-271.
- Segev, A. (2013). *Thinking and Killing: Philosophical Discourse in the Shadow of the Third Reich*. Boston: Walter de Gruyter, Inc.